

**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR
PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT GRHASIA PADA
UNIT KERJA PELAYANAN PENUNJANG MEDIS
DI RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA
D.I. YOGYAKARTA**

INTISARI

Oleh :

Dewi Lestari¹, Ari Hernawan²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Grhasia pada unit kerja penunjang medis di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yang menggunakan data sekunder dan data primer melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Lokasi penelitian lapangan di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta. Data primer diperoleh dari subjek penelitian sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumen, penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif adanya penjabaran dari peraturan tertinggi sebelumnya tentang standar pelayanan minimal, ada beberapa indikator yang ada di dalam Kepmenkes RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tidak dimasukkan ke dalam Pergub DIY Nomor 25 Tahun 2009 karena disesuaikan dengan jenis pelayanan dan standar yang ada, di lingkungan Pemda DIY belum ada aturan penjabaran dari peraturan sebelumnya mengenai SPM RS, acuan yang digunakan adalah Kepmenkes RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008, terdapat ketidakkonsistenan indikator dan standar pada lampiran I dan lampiran II Pergub DIY Nomor 25 Tahun 2009, dan di RS Jiwa Grhasia DIY sendiri belum ada penjabaran mengenai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Secara empiris menunjukkan bahwa lebih dari setengah bagian implementasi telah sesuai dengan amanat yang ada di dalam Pergub DIY Nomor 25 Tahun 2009, sebagian besar responden mengetahui definisi, kegunaan dan dasar hukum tentang SPM, serta unit kerja pelayanan penunjang medis telah menggunakan hasil SPM dalam proses perencanaan. Jajaran manajemen RS Jiwa Grhasia DIY kurang berperan optimal dalam upaya pembinaan dan pengawasan implementasi Pergub DIY Nomor 25 Tahun 2009.

Kata Kunci : Standar Pelayanan Minimal, Rumah Sakit Jiwa.

¹ Mahasiswa Program S2 Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

**IMPLEMENTATION OF THE GOVERNOR REGULATION OF
YOGYAKARTA SPECIAL PROVINCE NUMBER 25 YEAR
2009 ON MINIMUM SERVICES STANDARD GRHASIA
HOSPITAL IN MEDICAL SUPPORTING SERVICES
UNIT IN GRHASIA MENTAL HOSPITAL
YOGYAKARTA SPECIAL PROVINCE**

ABSTRACT

By
Dewi Lestari³, Ari Hernawan⁴

This research aims to know and review the implementation, coaching, and supervision of The Governor Regulation of Yogyakarta Special Province Number 25 Year 2009 on Minimum Service Standard of Grhasia Hospital on the medical support unit at Grhasia Mental Hospital.

This research is an empirical normative legal research using secondary data and primary data through literature research and field research. The location of field research at Grhasia Mental Hospital of Yogyakarta Special Province. Primary data obtained from the research subject while secondary data obtained from document studies, this study was analyzed by qualitative method and presented descriptively.

The result of the research shows that normatively the elaboration of the previous highest regulation on minimum service standard, there are several indicators in The Minister of Health Decree Number Number 129 / Menkes / SK / II / 2008 are not included in The Governor Regulation of Yogyakarta Special Province Number 25 Year 2009 because it is adjusted to the type existing services and standards, within the Yogyakarta Provincial Government there is no regulation of the previous regulation on hospital minimum service standards, the reference used is Kepmenkes RI Number 129 / Menkes / SK / II / 2008, there are inconsistencies of indicators and standards in annex I and appendix II of The Governor Regulation of Yogyakarta Special Province Number 25 Year 2009, and in Grhasia Mental Hospital itself has no description of the implementation instructions and technical instructions. The empirical indicates that more than half of the implementations are in accordance with the mandate in The Governor Regulation of Yogyakarta Special Province Number 25 Year 2009, most of the respondents know the definition, usefulness and legal basis of minimum service standards, and the medical support service unit has used the minimum service standards results in the planning process. The management of Grhasia Mental Hospital lacks optimal role in the effort of supervising and supervising the Year 2009.

Keywords : Minimum Service Standards, Mental Hospital.

³ Student of Graduate Program Master of Health Law Faculty of Law Gadjah Mada University Yogyakarta.

⁴ Lecturer Faculty of Law Gadjah Mada University Yogyakarta.